

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Helti Handraini¹, M. Fachri Adnan², Afriva Khaidir³

¹²³Jurusan Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

email: ¹heltihandrainichan@gmail.com ²fachriadnan@fis.unp.ac.id
³af.khaidir@fis.unp.ac.id

Abstrak

Masalah kemiskinan telah menjadi isu yang serius dan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pemerintah, dalam upaya menangani masalah kemiskinan, telah mengambil berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan dana desa untuk penggunaan dalam berbagai sektor. Salah satu prioritas utama dalam penggunaan dana desa adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Namun, meskipun BLT merupakan salah satu prioritas utama dalam penggunaan dana desa, masih ada tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangannya adalah bagaimana cara memberikan bantuan yang efektif dan tidak menyebabkan penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dari hasil pengambilan keputusan oleh pemerintah mengenai pemberian BLT melalui alokasi dana desa agar guna tepat sasaran dan merata kepada masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik atau sifat suatu fenomena, tanpa mencoba untuk menguji hipotesis atau membuat generalisasi statistik. Hasil dari penelitian diketahui jika pengambilan keputusan dalam pemberian BLT melalui alokasi Dana Desa menjadi kunci dalam menangani berbagai isu publik yang terkait dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Keputusan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan menggunakan data dan informasi yang akurat dan terkini. Selain itu, penting untuk memastikan efektivitas dan dampak positif dari program BLT tersebut.

Kata Kunci : *Alokasi Dana, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Penanganan Kemiskinan*

Abstract

The problem of poverty has become a serious issue and has become the center of attention for governments in various countries, including Indonesia. The government, in an effort to address the problem of poverty, has taken various initiatives. One of the initiatives taken is to allocate village funds for use in various sectors. One of the main priorities in using village funds is providing Direct Cash Assistance (BLT) to poor communities. However, even though BLT is one of the main priorities in using village funds, there are still challenges that must be overcome. One of the challenges is how to provide assistance

that is effective and does not lead to abuse. This research aims to analyze how the results of decision making by the government regarding the provision of BLT through the allocation of village funds are implemented so that it is used on target and evenly distributed to poor communities. This research uses a qualitative approach allowing researchers to understand phenomena in depth through analysis of non-numerical data, such as interviews, observations and document analysis. The descriptive method aims to describe in detail the characteristics or nature of a phenomenon, without trying to test hypotheses or make statistical generalizations. The results of the research show that decision making in providing BLT through Village Fund allocation is key in dealing with various public issues related to poverty and community welfare. This decision must be made by considering various relevant factors and using accurate and up-to-date data and information. Apart from that, it is important to ensure the effectiveness and positive impact of the BLT program.

Keywords: *Fund Allocation, Direct Cash Assistance (BLT), Poverty Management*

PENDAHULUAN

Adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada awalnya merupakan respons terhadap dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian dan mengalami kesulitan ekonomi. Setelah pandemi mereda pada tahun 2022, BLT tidak lagi difokuskan pada penanggulangan dampak COVID-19, namun berubah tujuan untuk menjangkau kelompok masyarakat miskin secara lebih spesifik. Pada tahun 2023, BLT dialokasikan khusus untuk masyarakat miskin dengan prioritas diberikan kepada mereka yang terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). P3KE adalah data yang berfungsi untuk menyalurkan individu / keluarga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif dalam membantu mereka yang paling membutuhkan, serta mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penerima BLT Dana Desa ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2023, dimana kriteria tersebut meliputi :

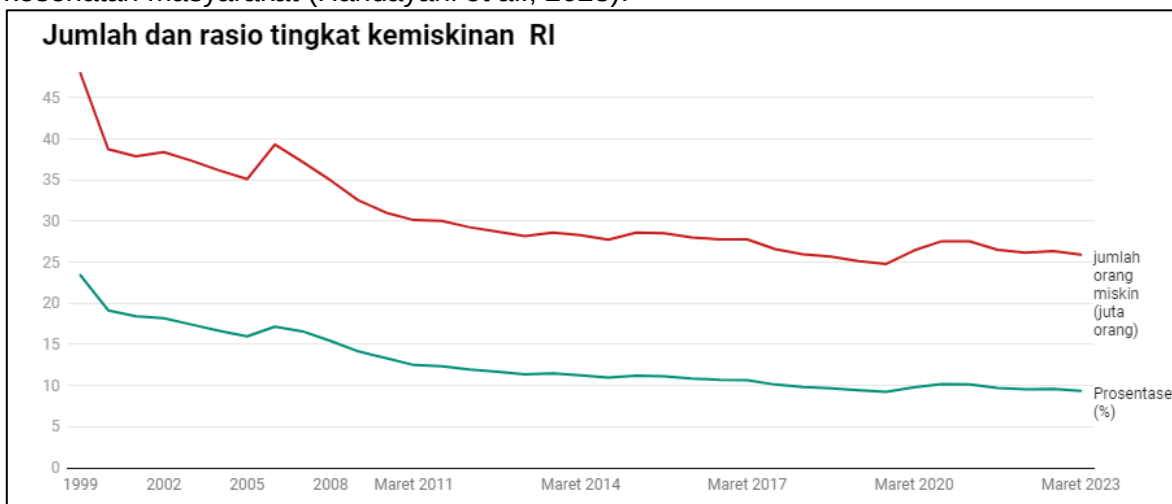
- a) Keluarga miskin yang tinggal di desa bersangkutan
- b) Keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 dalam Pensasaran Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- c) Jika tidak ada penduduk miskin di desa yang masuk dalam keluarga desil, maka KPM dari keluarga desil 2 hingga desil 4 dalam P3KE dapat ditetapkan.
- d) Pendudukan desaynag kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis/difabel, tidak menerima bantuan sosial PKH, atau dengan rumah tangga tunggal lanjut usia

Pengambilan keputusan merupakan kegiatan pemimpin yang dapat dijumpai pada semua tingkatan dan semua bidang manajemen, termasuk dalam bidang manajemen pendidikan. Pada umumnya suatu keputusan dibuat dalam rangka menyelesaikan/memecahkan permasalahan atau persoalan (problem solving). Pengambilan keputusan hal yang sangat urgen bagi setiap orang terutama bagi para pimpinan atau manajer. Eksistensi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai bentuk kebijakan dan keputusan yang diambilnya (Efendi & Afandi, 2021). Steers mengemukakan bahwa *“decision making is a process of selecting among available alternatives”*. Artinya bahwa pengambilan keputusan menyangkut pilihan dari

berbagai macam alternatif yang ada dalam organisasi. (Rustam & Aziz, 2019). Menurut Drummond (1993) dalam (Muhdi & Widodo, 2017) pengambilan keputusan adalah usaha untuk menciptakan kejadian-kejadian masa depan. Sementara itu Harrison (1992:5) dalam (Muhdi & Widodo, 2017) berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengevaluasi berbagai alternatif yang berhubungan dengan tujuan individu atau organisasi.

Implementasi pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah kebijakan melibatkan proses administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta, baik secara individu maupun secara kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan melibatkan serangkaian langkah dan pertimbangan yang komprehensif. Berdasarkan sumber yang disediakan, implementasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks penanganan kemiskinan, mencakup tiga aspek utama: adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan (outcome) yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Choiriyah, 2018).

Masalah kemiskinan telah menjadi isu yang serius dan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Faktor ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi tetapi juga dari aspek sosial dan budaya. Kemiskinan tidak hanya merupakan isu ekonomi, tetapi juga isu yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia. Kondisi kemiskinan dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti penurunan kualitas hidup, peningkatan tingkat kriminalitas, dan penurunan kesehatan masyarakat (Handayani et al., 2023).



Source : CNBC Indonesia Reasearch dan BPS DATA

Diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 menetapkan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, yang berarti sekitar 18,34 juta hingga 19,75 juta penduduk miskin pada akhir tahun 2024. Pada Maret 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang atau sekitar 9,36% dari populasi. Ini menunjukkan penurunan 0,46 juta orang dari September 2022 dan 0,26 juta orang dari Maret 2022. Dengan demikian, untuk mencapai target RPJMN 2024 yang sebesar 7%, pemerintah perlu mengurangi jumlah

penduduk miskin sekitar 6,5 juta dalam satu tahun. Angka ini sangat signifikan, mengingat jumlah penduduk miskin secara rata-rata hanya berkurang 10 ribu dalam lima tahun terakhir (2018-2022) karena dampak pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan periode normal sebelum pandemi (2017-2019), penduduk miskin hanya berkurang sekitar 950.000 orang. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan menurun menjadi 7,29%, dibandingkan dengan 7,53% pada September 2022. Sementara itu, di daerah perdesaan, persentase penduduk miskin turun menjadi 12,22%, dibandingkan dengan 12,36% pada September 2022. (www.cnbcindonesia.com).

Dalam menangani masalah kemiskinan, proses pengambilan keputusan memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan dan program intervensi yang efektif. Pengambilan keputusan ini melibatkan analisis mendalam terhadap sumber daya yang tersedia, pemahaman yang komprehensif tentang masalah kemiskinan, serta evaluasi terhadap dampak dari berbagai kebijakan yang diusulkan. Pentingnya pengambilan keputusan yang tepat juga melibatkan keterlibatan stakeholder yang relevan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat luas (Nacong & Lusiyanti, 2022).

Pemerintah, dalam upaya menangani masalah kemiskinan, telah mengambil berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan dana desa untuk penggunaan dalam berbagai sektor. Salah satu prioritas utama dalam penggunaan dana desa adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. BLT ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan harapan bahwa bantuan ini dapat membantu mereka untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemberian BLT melalui alokasi dana desa menjadi salah satu cara yang efektif untuk menangani masalah kemiskinan. Dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Bantuan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada masyarakat miskin, tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk bantuan sosial dan pendidikan. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300.000 setiap bulan selama 1 (Satu) tahun Dana Desa bertujuan untuk mencegah kemiskinan ditengah masyarakat terutama kemiskinan Ekstrem.

Namun, meskipun BLT merupakan salah satu prioritas utama dalam penggunaan dana desa, masih ada tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangannya adalah bagaimana cara memberikan bantuan yang efektif dan tidak menyebabkan penyalahgunaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan aspek ini dalam pengalokasian dana dan pemberian BLT. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas BLT yang telah diberikan kepada masyarakat miskin. Pengambilan keputusan dalam penanggulangan kemiskinan juga memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penggunaan data dan bukti yang kuat untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkena dampak kemiskinan, serta upaya kolaboratif untuk merancang dan melaksanakan solusi yang terbaik. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan bukan hanya tentang mengidentifikasi kebijakan yang tepat, tetapi juga tentang memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam upaya realisasi Peraturan Wali Nagari Anam Koto Selatan Nomor 2 Tahun 2024, tentang Penetapan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Nagari Anam Koto Selatan Tahun Anggaran 2024, Berdasarkan data dari P3KE yang dikeluarkan oleh Balitbangda Kabupaten Pasaman Barat, jumlah masyarakat miskin di Nagari Anam Koto Selatan mencapai 219 orang. Namun, hanya 40 di antaranya yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka sudah mendapatkan bantuan sosial jenis lain. Data penerima BLT diutamakan berasal dari P3KE, namun selain data tersebut, penerima BLT juga dapat ditentukan melalui musyawarah nagari (Musna) dengan ketentuan memenuhi kriteria desil penerimaan BLT. Proses musyawarah ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, sekaligus menghindari adanya tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan. Kerjasama antar lembaga dan sektor ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Dengan kerjasama yang baik dan efektif, diharapkan masalah kemiskinan dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pengambilan keputusan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Anam Koto Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pengambil keputusan, analisis dokumen kebijakan terkait, serta observasi langsung terhadap proses pengambilan keputusan. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data yang berbeda untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Proses pengumpulan data melibatkan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan anggota masyarakat yang terkait. Analisis dokumen kebijakan, seperti peraturan wali nagari dan laporan resmi, serta observasi langsung terhadap implementasi BLT di lapangan, juga dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik dan dinamika yang terjadi dalam implementasi BLT.

Data yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang terkait dengan konsep pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang proses dan dinamika implementasi BLT, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Nagari Anam Koto Selatan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan keberhasilan program BLT, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi peningkatan program di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengambilan Keputusan dalam Implementasi Kebijakan Pemberian BLT

Pengambilan keputusan dalam konteks pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Anam Koto Selatan melibatkan proses yang kompleks dan komprehensif. Berdasarkan data dari P3KE yang dikeluarkan oleh Balitbangda Kabupaten Pasaman Barat, jumlah masyarakat miskin di Nagari Anam Koto Selatan mencapai 219 orang. Namun, hanya 40 orang di antaranya yang menerima BLT. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka sudah mendapatkan bantuan sosial jenis lain. Data penerima BLT diutamakan berasal dari P3KE, tetapi selain data tersebut, penerima BLT juga dapat ditentukan melalui musyawarah nagari (Musna) dengan ketentuan memenuhi kriteria desil penerimaan BLT.

Dalam konteks ini, pemerintah desa menggunakan pendekatan "Pre-designed concept" yang mencakup pembangunan struktur dukungan yang sensitif, institusi yang kuat, dan pembangunan kapasitas yang berkelanjutan untuk organisasi komunitas (Singh, 2020). Proses pengambilan keputusan melibatkan identifikasi kriteria penerima bantuan, yaitu masyarakat yang sudah masuk data P3KE, penentuan jumlah dan alokasi dana, serta penentuan metode distribusi bantuan. Proses ini memerlukan pengetahuan mendalam tentang kondisi masyarakat miskin, serta kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan adil.

Sebagai contoh, dalam studi Hermawansyah et al. (2022), ditemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi BLT, termasuk masalah komunikasi, alokasi sumber daya, dan struktur birokrasi. Misalnya, di Nagari Anam Koto Selatan, proses pendataan dan penentuan penerima BLT tidak selalu efektif karena kurangnya surat tugas yang jelas dan konsistensi informasi kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat. Selain itu, terdapat tantangan dalam pengalokasian sumber daya, di mana jumlah tim yang terlibat dalam proses pendataan dan penentuan penerima BLT tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta kurangnya pelatihan khusus untuk tim tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan bahwa sumber daya dan sumber manusia yang diperlukan untuk implementasi BLT dialokasikan dan digunakan secara efektif.

Struktur birokrasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi BLT. Di Nagari Anam Koto Selatan, terdapat beberapa masalah dalam struktur birokrasi, termasuk kebutuhan untuk memenuhi prosedur operasi standar dan kebutuhan untuk diskresi yang besar dalam implementasi kebijakan yang bersifat tanggap darurat. Ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur dan menyusun pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang dalam implementasi BLT.

Namun, meskipun ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi BLT, ada juga upaya untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari program ini. Misalnya, pemerintah desa telah berusaha untuk meningkatkan konsistensi dalam komunikasi dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendataan dan penentuan penerima BLT. Upaya ini dilakukan dengan pelatihan yang lebih intensif dan alokasi tugas yang lebih jelas untuk para petugas yang terlibat.

Pendekatan musyawarah nagari (Musna) untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pemberian BLT di Nagari Anam Koto Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Musyawarah ini juga berperan penting dalam menghindari tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan kebutuhan aktual masyarakat.

Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam konteks pemberian BLT di Nagari Anam Koto Selatan tidak hanya didasarkan pada data dan teori semata, tetapi juga melibatkan proses deliberatif dan partisipatif yang memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kombinasi antara data empiris, partisipasi komunitas, dan kebijakan yang responsif terhadap dinamika lokal dalam mengatasi masalah kemiskinan.

2. Implementasi Pengambilan Keputusan Pemberian BLT Melalui Alokasi Dana Desa

Implementasi pengambilan keputusan dalam pemberian BLT melalui alokasi dana desa menjadi fokus utama dalam penanganan masalah ekonomi dan sosial. BLT ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada masyarakat miskin yang terdampak, terutama yang terdata dalam P3KE. Pemerintah desa menggunakan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa bantuan mencapai target yang tepat dan menghindari tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya.

Pada dasarnya, implementasi BLT melibatkan beberapa langkah penting, termasuk identifikasi dan penentuan penerima bantuan, alokasi dana, dan distribusi bantuan kepada masyarakat. Proses identifikasi penerima bantuan dilakukan dengan hati-hati, mengutamakan mereka yang benar-benar membutuhkan. Alokasi dana juga harus disesuaikan dengan jumlah penerima dan kebutuhan mendesak yang mereka miliki. Distribusi bantuan dilakukan secara teratur dan transparan untuk menghindari kesalahan dan penyalahgunaan.

Menurut penelitian Sofi (2021) di Indonesian Treasury Review, pelaksanaan BLT Dana Desa dapat berjalan efektif dengan tingkat kesuksesan yang tinggi dalam pemulihan ekonomi, mencapai sebanyak 114,93 persen. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian data, dan infrastruktur penyaluran tetap menjadi tantangan. Anggaran yang terbatas mempengaruhi jumlah bantuan yang dapat diberikan, sementara ketidaksesuaian data sering kali mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran. Infrastruktur penyaluran yang kurang memadai juga dapat memperlambat proses distribusi bantuan.

Pemerintah desa Anam Koto Selatan berusaha mengatasi kendala ini melalui musyawarah nagari (Musna) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Musyawarah ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat dan aparat desa, untuk mendiskusikan dan memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan. Dengan adanya musyawarah ini, diharapkan keputusan yang diambil lebih transparan dan akurat, serta mampu menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala untuk memastikan akurasi dan keandalan data penerima bantuan.

Dalam konteks data P3KE yang dikeluarkan oleh Balitbangda Kabupaten Pasaman Barat, ditemukan bahwa di Nagari Anam Koto Selatan terdapat 219 orang masyarakat miskin, namun hanya 40 di antaranya yang menerima BLT. Hal ini disebabkan sebagian besar dari mereka sudah mendapatkan bantuan sosial jenis lain. Pemerintah desa menggunakan data P3KE sebagai dasar utama, namun juga melakukan penyesuaian melalui musyawarah nagari untuk memastikan bantuan tidak tumpang tindih dan tetap tepat sasaran. Data penerima BLT diutamakan berasal dari P3KE, namun selain data tersebut, penerima BLT juga dapat ditentukan melalui musyawarah nagari dengan ketentuan memenuhi kriteria desil penerimaan BLT.

Selain itu, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang prosedur dan kriteria penerimaan BLT juga penting dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan transparansi. Pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan juga

diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efektif untuk kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan mereka.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito dalam FGD tersebut memaparkan tentang tujuh isu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, intervensi percepatan eliminasi TBC, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan narkoba, penurunan stunting, dana operasional pemerintah desa, dan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan dalam pemberian BLT melalui alokasi Dana Desa menjadi prioritas utama untuk mengatasi berbagai isu publik tersebut.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan integrasi data lapangan melalui musyawarah nagari, diharapkan implementasi BLT dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini juga mencakup evaluasi dan monitoring terus menerus untuk memastikan bahwa semua aspek dari program ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Nagari Anam Koto Selatan.

3. Dampak Implementasi Pengambilan Keputusan Terhadap Permasalahan Pemberian BLT Melalui Alokasi Dana Desa

Dampak implementasi pengambilan keputusan dalam pemberian BLT terlihat dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat miskin di Nagari Anam Koto Selatan. Bantuan finansial langsung memungkinkan masyarakat miskin mengakses kebutuhan dasar seperti makanan, pengobatan, dan pendidikan, yang secara signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka. BLT tidak hanya memberikan bantuan finansial langsung, tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas yang sangat diperlukan oleh keluarga miskin, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Penurunan tingkat kemiskinan juga menjadi salah satu dampak positif dari program BLT. Dukungan finansial ini membantu masyarakat mengatasi beban ekonomi dan mengalokasikan sumber daya untuk tujuan produktif, sehingga mengurangi risiko kemiskinan berulang. BLT memungkinkan penerima untuk menginvestasikan sebagian dari bantuan ini dalam kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti usaha kecil atau pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, BLT juga meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat jaringan dukungan komunitas dan meningkatkan partisipasi sosial. Komunitas yang saling mendukung dapat memberikan bantuan tambahan dan memperkuat solidaritas sosial, yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pemerintah desa terus melakukan evaluasi dan monitoring untuk memastikan efektivitas program BLT. Evaluasi ini mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap penggunaan dana oleh penerima manfaat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Kendala-kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur, diatasi melalui pendekatan kolaboratif dan penggunaan data yang akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pemerintah desa juga berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyalahgunaan. Melalui mekanisme feedback dari masyarakat, pemerintah desa dapat terus menyempurnakan proses implementasi BLT, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan data dari P3KE yang dikeluarkan oleh Balitbangda Kabupaten Pasaman Barat, jumlah masyarakat miskin di Nagari Anam Koto Selatan mencapai 219 orang, namun hanya 40 di antaranya yang menerima BLT. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program BLT memiliki dampak positif, masih ada tantangan dalam penentuan penerima bantuan yang tepat sasaran. Proses musyawarah nagari (Musna) juga

digunakan untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, sekaligus menghindari adanya tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan anggaran, yang maksimal 25% dari jumlah dana desa, pemerintah desa berusaha untuk mengalokasikan dana secara efisien dan tepat guna. Tantangan lainnya seperti ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan dan keterbatasan infrastruktur penyaluran menunjukkan pentingnya evaluasi dan monitoring terus menerus. Dengan demikian, evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi krusial dalam memastikan bahwa program BLT dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat miskin di Nagari Anam Koto Selatan. Implementasi BLT yang tepat, transparan, dan akuntabel dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, sehingga bantuan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak positif yang signifikan.

Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Anam Koto Selatan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, namun tetap menunjukkan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat miskin. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan identifikasi kriteria penerima, alokasi dana, dan distribusi bantuan dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Meskipun terdapat kendala dalam komunikasi, alokasi sumber daya, dan struktur birokrasi, upaya evaluasi dan monitoring terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.



Verifikasi Lapangan Penerima BLT DD Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Implementasi Kebijakan

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dikenal dengan *"Implementation as a Political and Administrative Process"*. Menurut Grindle (1980) dalam (Yoshua Pangalila et al., 2019) keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

Sedangkan menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)”. Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (topdown) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up)”. Kemudian Wahab (Tahir, 2014:55), mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) yang mencakup: (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan; (4) Apakah letak dari sebuah program sudah tepat; (5) Kebijakan telah menyebutkan impelmentornya dengan rinci; dan (6). Sebuah program di dukung oleh sumber daya manusia.

Dalam bentuk implementasi kebijakan dalam upaya penurunan kemiskinan di sebuah desa, salah satunya dalam Peraturan Wali Nagari Anam Koto Selatan Nomor 2 tahun 2024 tentang “Penetapan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Nagari Anam Koto Selatan Tahun Anggaran 2024” mengatur penggunaan Dana Desa untuk tahun 2024 yang diprioritaskan pada kegiatan pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa tahun 2024 diprioritaskan untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemberian BLT kepada keluarga miskin atau kurang mampu merupakan salah satu bentuk implementasi dari prioritas ini. Keluarga penerima manfaat (KPM) harus terdaftar dalam desil 1 hingga 4 dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau ditetapkan melalui musyawarah Nagari khusus. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial.

b. Kriteria dan Proses Pendataan Penerima BLT

Proses pendataan calon keluarga penerima BLT dilakukan oleh Satuan Tugas Nagari, yang bertugas mengumpulkan data calon penerima manfaat sebagai dasar penetapan daftar KPM BLT di Nagari Anam Koto Selatan. Dalam pendataan ini, keluarga yang terdaftar dalam desil 1 hingga 4 dalam data P3KE diberikan prioritas utama. Selain itu, penerima BLT juga dapat ditentukan melalui musyawarah Nagari khusus (Musna) dengan ketentuan memenuhi kriteria desil penerimaan BLT.

c. Penetapan Jumlah Penerima dan Distribusi BLT

Peraturan ini menetapkan bahwa BLT diberikan sebesar Rp. 300.000 per bulan dari Januari hingga Desember 2024. Total jumlah KPM BLT di Nagari Anam Koto Selatan sebanyak 40 KK, yang terbagi ke dalam beberapa wilayah: Jorong Anam Koto Selatan (17 orang), Jorong Limpato (8 orang), dan Jorong

Kembar Sari (15 orang). Jumlah dan distribusi ini dirancang untuk memastikan bantuan tersebar merata dan mencapai seluruh wilayah yang membutuhkan di Nagari Anam Koto Selatan.

d. Mekanisme Penggantian Penerima BLT

Peraturan ini juga mengatur mekanisme penggantian penerima BLT dalam kondisi tertentu seperti jika penerima meninggal dunia, mengundurkan diri, atau menerima bantuan lain dari pemerintah yang bersifat berkelanjutan. Dalam hal ini, KPM BLT dapat diganti dengan keluarga yang ada dalam daftar tunggu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang ada tidak berhenti atau tidak tepat sasaran.

Pasal 2 dari peraturan ini menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2024 diprioritaskan untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kriteria penerima BLT mencakup keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 hingga 4 dalam data P3KE dan keluarga yang ditetapkan melalui musyawarah Nagari. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mencapai keluarga yang membutuhkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui alokasi Dana Desa yang tepat sasaran. Dengan mekanisme pendataan yang ketat dan proses penetapan penerima yang transparan, diharapkan program BLT ini dapat memberikan dampak positif dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat miskin di Nagari Anam Koto Selatan.

Pengambilan Keputusan

Keputusan (decision) secara harfiah berarti pilihan (choice). Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo, bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan (Putra, 2022).

Setelah dipahami pengertian keputusan, selanjutnya dikutipkan pendapat para ahli mengenai pengertian pengambilan keputusan, dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan problem atau masalah dalam organisasi, sifat hakiki dari pengambilan keputusan adalah memilih satu dua atau lebih alternatif pemecahan masalah menuju satu situasi yang diinginkan, melalui keputusan atau penetapannya orang berharap akan tercapai suatu pemecahan masalah dari problem yang terjadi (Junaidi et al., 2020).

Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan: (Sukatin et al., 2022)

- a. Tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain
- b. Tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua (atau lebih) masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif.

Implementasi Pengambilan Keputusan

Dalam studi tentang pengambilan keputusan dikenal tiga teori yaitu: teori probabilitas, teori utilitas, dan teori permainan (Harrison, 1992 : 215-219). Teori probabilitas didasarkan pada peluang hasil bila dalam periode waktu tertentu suatu kejadian diulang-ulang. Teori utilitas didasarkan pada seberapa besar manfaat yang

diperoleh dari sebuah kejadian yang dipilih. Teori permainan digunakan apabila seorang pengambil keputusan tidak mengetahui situasi dan kondisi yang riil, dan biasanya digunakan dalam situasi konflik. Menurut (Muhdi & Widodo, 2017) Berdasarkan teori pengambilan keputusan tersebut, terdapat beberapa teknik pengambilan keputusan yang merupakan perpaduan dari teori probabilitas dan teori utilitas.

Pertama, teknik pengambilan keputusan *expected values*. Teknik ini mempertimbangkan kemungkinan munculnya kejadian dan kemungkinan hasil. Kombinasi dua kemungkinan tersebut menghasilkan nilai moneter yang diharapkan. Kejadian yang memiliki nilai moneter paling tinggi akan menjadi pilihan seorang pengambil keputusan. *Kedua*, teknik pengambilan keputusan *payoff tables*. Teknik ini memperhitungkan alternatif kejadian yang muncul dan alternatif situasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. *Ketiga*, teknik pengambilan keputusan *decision trees*. Keputusan dilakukan dengan cara membuat anatomi sebuah pohon yang terdiri dari titik dan cabang. Penilaian kejadian dimulai dari titik dengan melewati cabang, setiap cabang menggambarkan kemungkinan keberhasilan sebuah kejadian. Semakin besar kemungkinan keberhasilannya akan menjadi pilihan seorang pengambil keputusan.

Implementasi Pengambilan Keputusan dalam Menyelesaikan Masalah

Adapun teknik pengambilan keputusan yang lainnya antara lain adalah :

a. Teknik Partisipatif

Teknik partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan gaya kepemimpinan demokratis dan kebanyakan berorientasi pada perilaku. Sebagai teknik pengambilan keputusan, partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses.

b. Teknik pengambilan Keputusan Kelompok

Teknik pengambilan keputusan kelompok membantu pimpinan untuk mengambil keputusan lebih efektif.

c. Teknik Delphi

Teknik Delphi pertama kali dikembangkan kurang lebih tahun 1950 an. Teknik tersebut baru dipopulerkan akhir-akhir ini yaitu awal tahun 2000 nan sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang.

d. Teknik Kelompok Nominal

Dalam pengambilan keputusan teknik pendekatan kelompok nominal dikembangkan menjadi teknik khusus.

Implikasi teknik keputusan yang digunakan oleh pimpinan adalah pada sejauh mana keputusan yang diambil tersebut efektif dan dapat dilaksanakan. Pimpinan atau pengambil keputusan cenderung menggunakan beberapa teknik dan model pengambilan keputusan disesuaikan dengankasus dan situasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Biasanya pimpinan mengandalkan lebih dari satu gaya keputusan dan hal ini akan bervariasi menurut pekerjaan, tingkat kerja, dan budaya. teknik tersebut merupakan indikator untuk menentukan kekuatan dan kelemahan pembuat keputusan.

SIMPULAN

Disimpulkan Pertama, pengambilan keputusan dalam pemberian BLT melalui alokasi Dana Desa menjadi kunci dalam menangani berbagai isu publik yang terkait dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Keputusan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan kriteria masyarakat kategori Miskin Ekstrem. Kedua, dalam proses pengambilan keputusan, penting untuk memperhatikan dan menggunakan data dan informasi yang akurat dan terkini. Misalnya,

data tentang jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, dan kriteria penerima BLT harus diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Data ini kemudian dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan pemerintah dan lembaga terkait dalam menentukan prioritas dan kriteria penerima BLT. Ketiga, dalam implementasi BLT, penting untuk memperhatikan dan memastikan efektivitas dan dampak positif dari program tersebut. Misalnya, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas BLT yang telah diberikan kepada masyarakat miskin. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan dan memastikan bahwa bantuan tersebut tidak menyebabkan penyalahgunaan. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan dalam pemberian BLT melalui alokasi Dana Desa menjadi kunci dalam menangani berbagai isu publik yang terkait dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Keputusan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan menggunakan data dan informasi yang akurat dan terkini. Selain itu, penting untuk memastikan efektivitas dan dampak positif dari program BLT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan ; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kelurahan Kuto Batu. *Islamic Banking*, 3 (2), 17–30.
- Efendi, D. M., & Afandi, A. (2021). Sistem Pengambilan Keputusan Penerima Bantuan Renovasi Rumah Dengan Menggunakan Metode Wp Dan Saw. *Jurnal Informatika*, 21(2), 115–123.
- Handayani, T. P., Wantu, P. I., & Ibrahim, I. (2023). Perancangan Prototipe Website Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Ilmu Komputer*, 2(2), 85–101.
- Harrison, E. . (1992). *The Managerial Decision-Making Process*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Hermawansyah, A., Purna, Z. A., & Sugito, A. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai. *Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 5(2), 69–85.
- Junaidi, M., Satria, F., & Garaika, G. (2020). Model Pengambilan Keputusan Calon Penerima Bantuan Usaha Mikro Bank Lampung Dengan Metode Weighted Product Di Pringsewu. *JTKSI (Jurnal Teknologi Komputer Dan Sistem Informasi)*, 3(1), 20–15.
- Muhdi, N., & Widodo, S. (2017). Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 135–145.
- Nacong, N., & Lusiyanthi, D. (2022). Pendukung Keputusan Penerima BLT-Dana Desa Menggunakan Metode Weight Product. ., *Jurnal Ilmiah Matematika Dan Terapan*, 19(1), 82–89.
- Putra, B. E. (2022). Artikel Pengambilan Keputusan Implementasi Teknik Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan di Sekolah Bayu Eka Putra Universitas Negeri Padang Indonesia Email: bayuekaslow.bep@gmail.com. *Jurnal Pendidikan Administrasi*, 3 (5), 44–58.
- Rustam, R., & Aziz, R. A. (2019). Model Pengambilan Keputusan Penerima Bantuan Raskin Menggunakan Metode Weighted Product (Wp) Dan Topsis. ., *Jurnal Informasi Dan Komputer*, 7(2), 19–30.
- Singh, P. K. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. *Plos One Journal*, 15(1), 1–6.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan

- Ekonomi Di Desa. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6 (3), 247–262.
- Sukatin, Astuti, A., Rohmawati, A., Ananta, A., Aprianti, A., & Sodik, I. A.-. (2022). Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan. *Jurnal Humatech*, 1(9), 1156–1167.
- Yoshua Pangalila, Kumayas, J., & Neni, K. (2019). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–9.